

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada paruh kedua abad ke-19 Sumatra Timur mengalami kolonisasi. Wilayah ini berhasil dikuasai pemerintah Hindia Belanda pada 1 Februari 1858 melalui kontrak politik, dan untuk mengukuhkan kekuasaannya di Sumatra Timur, sejak tahun 1862 sampai berakhirnya ekspedisi Pemerintah Hindia Belanda di Sumatra Timur tahun 1865 pemerintah Hindia Belanda menaklukan satu persatu penguasa setempat melalui perundingan-perundingan dan bagi yang menolak berunding dilakukan tindakan agresi militer. Bersamaan pengukuhan itu, sejak tahun 1863 Sumatra Timur mulai dieksploitasi oleh kepentingan pihak modal swasta asing untuk membuka usaha industri perkebunan. Berkat dorongan hasil budidaya tembakau berkualitas baik dari Sumatra Timur sehingga Sumatra Timur menjadi terkenal ke seluruh dunia, dan budidaya tembakau dari Sumatra Timur menjadi produk menguntungkan di pasar Eropa. Ditambah lagi dengan ketersediaan lahan yang melimpah, kesuburan tanah yang sangat baik, jarangny penduduk, dan kemudahan memperoleh dukungan dari penguasa setempat dan pemerintah kolonial (Pelzer, 1985: 90), serta pengaruh pembukaan terusan Zues tahun 1869 yang telah memungkinkan tersedianya rute lebih cepat antara Hindia Belanda dan Eropa, diberlakukannya UU Agraria 1870 yang mengurangi intervensi pemerintah dan memberi kuasa pada pihak swasta di bidang ekonomi,

dan penerapan aturan kerja, usaha industri perkebunan yang dibuka berkembang pesat dan menarik Sumatra Timur masuk ke dalam pusaran ekspansi kapitalis kolonial.

Dalam kurung waktu yang cepat Sumatra Timur telah betransformasi dari yang masih ditutupi hutan hujan tropik, sepertiga wilayahnya menjadi kawasan usaha paling intensif dan membawa keuntungan secara ekonomi bagi segenap imperium kolonial Barat dan penguasa setempat. Namun seiring dengan perkembangan itu berbagai kasus penyakit ikut melanda Sumatra Timur dan menyebabkan kualitas kesehatan di wilayah ini buruk. Salah satunya disebabkan oleh penyakit kelamin.

Meskipun data statistik tentang jumlah penderita penyakit kelamin hampir tidak ada di Sumatra Timur. Kebanyakan laporan medis meniadakan catatan memalukan itu. Tetapi dari sejumlah kecil referensi yang terdapat tidak meragukan sedikit pun bahwa penyakit kelamin memang menyebar luas. Melihat bahwa praktik pelacuran sengaja dibiarkan berkembang merajarela di Sumatra Timur. Maka, tidak heran jika resiko besar penularan penyakit kelamin dapat terjadi di Sumatra Timur. Namun bukan berarti tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit kelamin di Sumatra Timur selain dari aktivitas tersebut.

Penyakit kelamin sendiri dianggap memiliki dua wajah karena dari aspek simtom penyakit ini merupakan urusan para dokter, sedangkan dari aspek pemaknaan sosial penyakit ini merupakan persoalan moralis karena menurut

mereka penyakit kelamin merupakan buah dari laku immoral, yakni hubungan seksual di luar pernikahan yang sering dilakukan dengan para pelacur.

Pada masa pemerintah Hindia Belanda penyakit kelamin tidak hanya menyangkut urusan para dokter ataupun urusan para moralis, namun juga menimbulkan kekhawatiran pada tataran politik karena penyakit kelamin banyak menyerang otoritas kekuasaan kolonial, yaitu kalangan militer dan tenaga kerja.

Kondisi ini mendorong adanya upaya penanganan penyakit kelamin dari pelbagai sudut pandang. Pada tataran politik, pemerintah kolonial menganggap penanganan penyakit kelamin hanya bisa dilakukan dengan cara menertibkan para pelacur. Itulah sebab pada tahun 1852 pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan tentang pelacuran, yang membuat para pelacur harus selalu berada di bawah pengawasan dokter dan polisi. Kemudian tahun 1873 pengawasan pelacuran diganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemberlakuan peraturan tentang pelacuran dikodifikasikan kembali tahun 1874. Di Sumatra Timur peraturan tentang pelacuran mulai diterapkan tahun 1885. Bagi kaum moralis penanganan penyakit kelamin dilakukan dengan menyebarkan moral puritan yang menganjurkan laku berpantang dan pemeriksaan prapernikahan. Sedangkan para dokter menawarkan perawatan berkala, praktik sunat, penggunaan kondom, dan menekankan pentingnya hidup higienis untuk menghindari penularan penyakit kelamin.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang penyakit kelamin yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Sumatra Timur

dengan mengangkat judul sebagai berikut : “Penyakit Kelamin di Sumatra Timur 1870-1942”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pemicu kemunculan dan penyebaran penyakit kelamin di Sumatra Timur pada tahun 1870-1942.
2. Jenis-jenis penyakit kelamin yang teridentifikasi berjangkit di Sumatra Timur pada tahun 1870-1942.
3. Dampak penyebaran penyakit kelamin terhadap kehidupan penduduk di Sumatra Timur pada tahun 1870-1942.
4. Upaya penanganan penyakit kelamin di Sumatra Timur 1870-1942.
5. Kalangan yang terjangkit penyakit kelamin di Sumatra Timur pada tahun 1870-1942.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas penulis membatasi masalah pada Penyakit Kelamin di Sumatra Timur 1870-1942.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyakit kelamin menyebar di Sumatra Timur ?
2. Bagaimana dampak penyebaran penyakit kelamin terhadap kehidupan penduduk di Sumatra Timur ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk menangani penyakit kelamin yang menyebar di Sumatra Timur ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penyebaran penyakit kelamin di Sumatra Timur.
2. Menganalisis dampak penyebaran penyakit kelamin terhadap kehidupan penduduk di Sumatra Timur.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk menangani penyakit kelamin di Sumatra Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi akademisi :

Sebagai informasi ilmiah bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang sejarah kesehatan di Indonesia, dan dapat dijadikan bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah :

Sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan dalam mengatasi masalah pelacuran dan penyakit kelamin yang terjadi sekarang melalui pendekatan sejarah.

3. Bagi masyarakat umum :

Dapat memberikan informasi tentang penyakit kelamin yang terjadi di Sumatra Timur tahun 1870-1942.



THE
Character Building
UNIVERSITY